



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

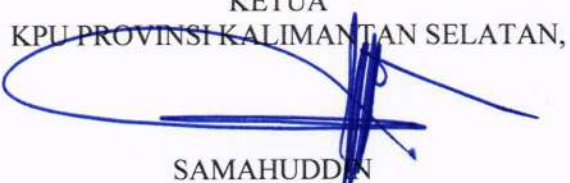
Nama : BASUKI
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : SAMAHUDDIN
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

PIHAK KEDUA
KETUA
KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

SAMAHUDDIN

Banjarmasin, 15 Januari 2018
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

BASUKI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan	93%
2.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
3.	Terselesainya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota	100%
4.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	13 Laporan
5.	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Provinsi	Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai	12 Layanan
6.	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	1 Laporan
7.	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Laporan penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	1 Laporan
8.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Layanan pengadaan logistik keperluan Pemilu / Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	1 Layanan Pengadaan
		Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan pemilu	1 Dokumen
		Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik pemilu	8 Unit
9.	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara berdasarkan SAP	Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	1 Dokumen
10.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	100%
11.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	12 Layanan Bulan
12.	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU / KPU Provinsi/KPU Kabupaten / Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%

13.	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	98%
14.	Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta penelitian dan pengembangan terhadap organisasi dan kebutuhan Pemilu/Pemilihan	Jumlah dokumen riset kepiluan	1 Dokumen
15.	Terwujudnya sistem administrasi Penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan
		Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU / KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%
16.	Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui Coklit dan Sistem Informasi	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik	80%
17.	Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu	Ketepatan waktu dalam pembentukan badan penyelenggara adhoc	100%
18.	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Jumlah laporan evaluasi LAKIP	1 Laporan
19.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	96%
20.	Terlaksananya layanan peningkatan kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%
21.	Tersedianya dokumen kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian secara akurat	100%
22.	Terlaksananya seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase Anggota KPU yang dilantik	100%
23.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%
24.	Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Tersusunnya Pedoman teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD yang disusun sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	1 Juklak
		Laporan pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	1 Laporan
		Tingkat ketepatan analisis dan masukan verifikasi perseorangan peserta Pemilu	1 Calon
		Tingkat ketepatan analisis dan masukan verifikasi partai politik peserta Pemilu	1 Partai Politik

25.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
26.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	1 Layanan
27.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang menyelenggarakan tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan jadwal	100%
		Tersusunnya rancangan pedoman/juknis penyelenggaraan tahapan Pemilu	1 Juklak/ Juknis
28.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan	90%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	98%
29.	Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih Pemilu Kabupaten/Kota yang partisipasi rendah, potensi pelanggaran Pemilu tinggi dan rawan konflik/bencana yang mendapatkan pendidikan pemilih	3 Kegiatan 1 Satker
30.	Terselenggaranya bimbingan teknis / supervisi / publikasi / sosialisasi penyelenggaraan Pemilu	Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	4 Kebijakan
		Tersusunnya laporan kampanye Pemilu calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	1 Laporan
		Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu	1 Kegiatan
31.	Terseleksinya calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota peserta Pemilu	Jumlah Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terseleksi sebagai peserta Pemilu	1 Orang
		Jumlah Anggota DPD terseleksi sebagai peserta Pemilu	1 Orang
32.	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan Pilkada dan Pemilu Legislatif serta Presiden/Wakil Presiden	90%

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Rp. 14.505.919.000 |
| 2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik | Rp. 4.602.610.000 |

Banjarmasin, 15 Januari 2018

KETUA
KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



SAMAHUDDIN

SEKRETARIS
KPU PROVISI KALIMANTAN SELATAN,



BASUKI